

ABSTRAK

Setiaji Ilham Nugraha, 1213030123 (2026): Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Transportasi Kota Bandung

Transportasi publik merupakan layanan dasar yang berperan penting dalam menjamin mobilitas masyarakat perkotaan, khususnya di Kota Bandung yang memiliki tingkat kepadatan dan kompleksitas wilayah yang tinggi. Pemerintah Kota Bandung menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Transportasi Kota Bandung sebagai dasar pengembangan sistem angkutan massal melalui Trans Metro Bandung (TMB). Namun, implementasi Pasal 7 Peraturan Wali Kota tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada efektivitas penyelenggaraan transportasi publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Gambaran umum Transportasi Publik di Kota Bandung (2) Efektivitas implementasi transportasi publik di Kota Bandung, serta (3) meninjaunya dari perspektif *siyasah dusturiyah*.

Dalam penelitian ini, menggunakan teori kewenangan untuk menilai kedudukan dan daya ikat Peraturan Wali Kota dalam sistem hukum nasional, teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, serta teori siyasah dusturiyah untuk menilai kebijakan transportasi publik berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan masalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif analisis. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan terkait.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) pelaksanaan teknis transportasi publik dan sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, (2) implementasi Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2015 belum efektif: Ditemukannya keterbatasan armada, ketimpangan persebaran rute dan halte (3) TMB termasuk kategori masalah hajiyyat dan dominan berkaitan dengan maqashid syariah dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu, perbaikan transportasi publik di Kota Bandung memerlukan penguatan kepemimpinan yang bertanggung jawab, konsistensi kebijakan, serta hubungan yang lebih responsif antara pemerintah dan masyarakat. **Kata kunci:** Hirarki hukum, implementasi kebijakan, *siyasah dusturiyah*, trans metro bandung, transportasi publik.